

Model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan

Ari Singgar Cahyani, Johan Arifin

Program Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

*Corresponding author: singgarari@gmail.com

Abstrak

Faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan harus diidentifikasi guna mendorong upaya untuk memastikan laporan keuangan disusun secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi, serta koneksi politik yang meliputi kepemilikan pemerintah, dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan di industri ekstraktif Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, teori akuntabilitas, dan teori akuntansi positif yang akan mendasari dampak atas tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan model Beneish untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk membangun model konseptual terhadap potensi kecurangan laporan keuangan dengan menggabungkan enam konsep dan tiga teori dalam satu kerangka model konseptual. Model konseptual penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan, dan menjadi referensi terbaru khususnya terkait koneksi politik perusahaan di industri ekstraktif.

Kata kunci: kecurangan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, koneksi politik

PENDAHULUAN

Laporan keuangan berperan penting untuk mengungkapkan aktivitas ekonomi perusahaan, sehingga laporan keuangan harus disusun secara transparan dan akuntabel. Namun, kecurangan laporan keuangan masih menjadi masalah global yang mempengaruhi berbagai bisnis dengan dampak negatif yang signifikan terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan terkait (Craja *et al.*, 2020). Di Indonesia, ACFE dalam Occupational Fraud 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat empat sebagai negara di Asia Pasifik dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak yakni 23 kasus pada tahun 2022. Sayangnya, kasus kecurangan yang terjadi belum secara eksplisit mengungkap potensi kecurangan laporan keuangan yang mungkin terjadi sebagai salah satu metode dalam skema praktik kecurangan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti tingginya risiko kecurangan pada perusahaan di industri ekstraktif (Lemaitre, 2019), sehingga penting untuk menguji secara empiris potensi kecurangan laporan keuangan meskipun tata kelola perusahaan telah diterapkan sesuai regulasi, dan terbatasnya analisis koneksi politik perusahaan. Proses bisnis di industri ekstraktif sangat erat dengan proses perizinan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai level pejabat di pemerintahan.

Mengutip Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (2024), kasus kecurangan perusahaan di industri ekstraktif seperti pada PT Timah Tbk (2015-2022) mayoritas melibatkan manajemen puncak di level direktur, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan di sektor pertambangan melibatkan koneksi politik terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan di level daerah hingga pusat untuk melancarkan praktik kecurangan mereka. Pendapatan dan laba paling banyak dimanipulasi pada perusahaan yang melibatkan transaksi pihak terkait (Kabwe, 2023), meskipun perusahaan tersebut telah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan Pedoman Tata

Kelola Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan. Masalah tata kelola perusahaan dan birokrasi menjadi sorotan selama beberapa dekade terakhir untuk menganalisis risiko atau potensi kecurangan tersebut.

Survei yang dilakukan oleh the Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan CLSA Limited (CLSA) yang dipublikasikan dalam 11th biennial CG Watch 2023 melaporkan bahwa Indonesia berada pada peringkat terakhir (nilai persentase 35,7) dari dua belas negara yang dilakukan survei sejalan dengan meningkatnya korupsi dan *inside trader*. Sangat jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (nilai persentase 64,6) dan Malaysia (nilai persentase 61,5) yang masing-masing menempati peringkat dua dan lima. Hal ini menunjukkan masih adanya masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Manajemen puncak memiliki peran vital dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung akuntabilitas dan transparansi. Atribut tata kelola perusahaan harus dipertimbangkan dalam upaya perusahaan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan (Nasir *et al.*, 2019). Meskipun perusahaan telah memiliki atribut tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan masih menghadapi risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan, di mana ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kurnia *et al.*, 2024; Kaituko *et al.*, 2023; Purwiyanti & Laksito, 2022; Probohudono *et al.*, 2022; Brogi *et al.*, 2021; Nurcahyono *et al.*, 2021; dan Kusuma & Fitriani, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan atribut tata kelola yang meningkatkan upaya pengawasan internal melalui peningkatan ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit, serta pencegahan konflik kepentingan (*agency problem*) melalui peningkatan kepemilikan manajerial, maka perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan. Ketika perusahaan mampu menjaga aktivitas bisnis tetap transparan dan akuntabel melalui peningkatan atribut pengawasan dan menekan konflik kepentingan, peluang tindakan kecurangan akan lebih kecil sehingga pada gilirannya menekan peluang kecurangan laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kabwe, 2023 dan Daresta & Suryani, 2022). Transaksi pihak berelasi cenderung dilakukan sebagai salah satu metode untuk memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan pengalihan atau pemindahan kekayaan (*tunneling*) dari pemegang saham (Habib *et al.*, 2017), sehingga pada gilirannya risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki lebih tinggi transaksi pihak berelasi.

Selain masalah tata kelola perusahaan, Bertrand *et al.* (2018) mengemukakan bahwa potensi kerugian lebih tinggi dari koneksi politik bagi perusahaan yang tidak diimbangi dengan manfaat lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuatnya pengaruh politik dalam bisnis yang ditunjukkan dengan banyaknya pejabat penting di pemerintahan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun, serta anggota partai politik yang menduduki posisi direksi atau komisaris perusahaan (Kholid *et al.*, 2023). Selain itu, hubungan politik perusahaan dapat terbentuk melalui sifat kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018), dan setidaknya ada satu pemegang saham (mengendalikan setidaknya 10% suara secara langsung atau tidak langsung), atau anggota dewan atau komisaris merupakan mantan atau saat ini menjabat anggota parlemen, menteri atau kepala pemerintah daerah, politisi atau pejabat partai, anggota militer atau polisi atau pejabat pemerintah (Habib *et al.*, 2017).

Koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah pada perusahaan mungkin mendorong pengawasan internal yang lebih baik dan kesediaan perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara relevan dan akuntabel karena akses yang lebih besar oleh pemerintah terhadap perusahaan. Di sisi lain, koneksi politik dewan komisaris dan direksi mungkin memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kemampuan untuk melakukan transfer kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dua paradigma koneksi politik perusahaan ini mendorong peneliti mengkaji kaitan koneksi politik di perusahaan pada potensi kecurangan laporan keuangan di Indonesia secara lebih lanjut. Di saat yang sama, dunia bisnis dan sektor politik memiliki area abu-abu (*gray area*) yang sulit diidentifikasi bagaimana kerugian-manfaat yang mungkin

ditimbulkan di tengah tarik menarik antara kepentingan politik dan bisnis, mengingat baik pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik. Oleh sebab itu, koneksi politik individu pada manajemen puncak lebih mungkin memunculkan risiko kecurangan dibandingkan koneksi politik yang timbul akibat dari kepemilikan pemerintah.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan, di mana kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Ababneh & Aga, 2019). Pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keadilan dan transparansi akan turut mendorong perusahaan yang dimilikinya untuk memastikan pengawasan manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan memastikan kepercayaan dan reputasi publik yang baik melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan, koneksi politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wang *et al.*, 2024; Maulidi *et al.*, 2023; dan Sudirman *et al.*, 2023). Manajemen puncak perusahaan yang berada pada jabatan politik atau memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik, sehingga pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan politik untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian di atas, model konseptual penelitian ini dilakukan untuk mengisi *gap* pada penelitian Firdarini (2023), Tarjo *et al.* (2023), dan Kabwe (2023) yang melakukan penelitian pada perusahaan di industri ekstraktif khususnya perusahaan pertambangan namun variabel yang digunakan hanya terbatas pada rasio keuangan dan belum menganalisis struktur tata kelola perusahaan. Selain itu, bukti empiris pada penelitian terkait pengaruh koneksi politik dalam suatu perusahaan di industri ekstraktif Indonesia masih sangat terbatas khususnya terhadap kecurangan laporan keuangan. Peneliti menggunakan Model Beneish yang memiliki presisi lebih tinggi dan tingkat kesalahan lebih kecil untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan dibandingkan Model Dechow (Kaab Omeir *et al.*, 2023). Sehingga, model konseptual ini menggabungkan enam konsep dalam satu model penelitian, di antaranya tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi, serta koneksi politik yang meliputi kepemilikan pemerintah, dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan industri ekstraktif di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) dalam penelitiannya yang berjudul "*Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*" menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana salah satu atau lebih pemilik melibatkan agen agar memperhatikan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan pengambilan keputusan. Prinsipal dalam teori ini diperankan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan agen diperankan oleh orang-orang pada posisi manajemen perusahaan seperti dewan komisaris dan direksi perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan kontrol atas manajemen suatu perusahaan tersebut dapat meningkatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen, sehingga pada gilirannya turut memunculkan risiko kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, teori keagenan dapat digunakan sebagai pemahaman dasar terkait tata kelola perusahaan dan kecurangan laporan keuangan.

Struktur tata kelola perusahaan yang baik memberikan garis akuntabilitas dan pelaporan yang transparan serta mendefinisikan hubungan dan harapan pihak-pihak yang terlibat, sehingga kecurangan laporan keuangan dapat dicegah. Dandapani & Shahrokhi (2022) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan bergantung pada mekanisme internal seperti struktur dewan dan insentif bagi manajemen. Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terjadi apabila struktur tata kelola perusahaan tidak mencerminkan atribut pengawasan internal yang kuat dan upaya menekan sifat oportunistik agen sehingga agen dapat memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi termasuk melakukan kecurangan, dan pada gilirannya merugikan kepentingan prinsipal.

Apabila suatu perusahaan memiliki struktur tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial yang semakin rendah, maka akan berisiko melemahkan pengawasan internal dan mendorong potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Di saat yang sama, apabila transaksi pihak berelasi perusahaan semakin rendah maka kemungkinan agen melakukan kecurangan melalui kesepakatan-kesepakatan yang tidak transparan melalui transaksi pihak berelasi akan semakin kecil, dan pada gilirannya akan menurunkan potensi kecurangan laporan keuangan. Dalam kondisi-kondisi tersebut, konflik keagenan dapat diminimalisir sehingga agen tidak akan melakukan tindakan tidak etis, misalnya kecurangan laporan keuangan, dan mereka dapat mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan terbaik prinsipal.

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas (Tetlock, 1985) menggambarkan individu sebagai politisi yang bereaksi terhadap akuntabilitas dengan cara mengoptimalkan posisi mereka dalam sistem sosial, khususnya bagi eksekutif. Teori akuntabilitas memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan (Guidice *et al.*, 2013) sehingga pada gilirannya menekan potensi kecurangan laporan keuangan. Pengawasan oleh pemerintah yang lebih tinggi pada suatu perusahaan dapat terwujud salah satunya dengan pemerintah yang turut memiliki saham perusahaan tersebut. Di saat yang sama, koneksi politik terbentuk di mana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan (Zhang, 2018).

Berdasarkan teori akuntabilitas, akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pemerintah memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan (Hussain & Moriarty, 2018). Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya secara akuntabel dan transparan, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa pajak, regulasi, rencana kompensasi manajemen, biaya informasi, dan biaya politik menentukan pilihan akuntansi (Watts & Zimmerman, 1978). Biaya politik adalah transfer kekayaan yang dipaksakan pemerintah dari sektor swasta. Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijaksanaan dalam pilihan akuntansi untuk mengatur munculnya laba yang lebih rendah sebagai respons terhadap peningkatan ancaman biaya politik (Watts & Zimmerman, 1978). Oleh sebab itu, faktor biaya politik (*political costs*) dapat menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik.

Berdasarkan teori ini, ketika ancaman biaya politik tinggi, hipotesis biaya politik memperkirakan bahwa perusahaan akan mengatur kemunculan laba yang lebih rendah melalui pilihan akuntansi (Boland & Godsell, 2020). Sektor politik memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi transfer kekayaan antar berbagai kelompok, dan sektor korporasi sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan ini guna menggeser laba agar lebih rendah sehingga laporan keuangan tidak akuntabel. Eksekutif perusahaan yang dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang berada pada jabatan politik atau memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik, pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan koneksi politik untuk keuntungan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham, termasuk melakukan praktik kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi, serta memastikan perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi disetujui dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, jalannya kepengurusan dan bisnis perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi.

Menurut teori agensi, pemisahan kepemilikan dan kontrol atas manajemen suatu perusahaan dapat memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Peran dewan komisaris sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan dijalankan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik. Pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan, dewan komisaris bersama dengan komite audit akan menjalankan peran pengawasan terhadap elemen-elemen pelaporan keuangan melalui bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan. Oleh sebab itu, ukuran dewan komisaris menjadi instrumen penting dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kurnia *et al.* 2024; Setianingsih *et al.*, 2024; Rudyanto, 2024; Diah *et al.*, 2023; dan Brogi *et al.*, 2021) (Dahlan & Andesto, 2022). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan lebih banyak sumber daya bagi perusahaan untuk menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Komite audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertanggungjawab mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan potensi pelanggaran maupun tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, misalnya manajer dan direksi. Tata kelola perusahaan yang baik memerlukan diskusi terbuka antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, rapat komite audit sebagai fungsi *monitoring* dapat menjadi fasilitas untuk mencapai hal tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan manajer dan/atau direksi. Maka penting untuk tidak memberikan celah baik waktu maupun kesempatan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan melakukan kecurangan dengan meningkatkan frekuensi pengawasan melalui rapat komite audit.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2025 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit diwajibkan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan setidaknya dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari anggota. Pada penelitian ini, rapat komite audit yang dimaksud adalah semua rapat komite audit yang dilaksanakan untuk memantau, mengawasi, dan membahas informasi keuangan perusahaan agar dapat mendeteksi maupun menindaklanjuti kecurangan.

Teori agensi mengemukakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga rapat komite audit diperlukan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Rapat komite audit diselenggarakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pelaporan keuangan dan proses pengungkapan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Negoro & Wakan, 2022; Purwiyanti & Laksito, 2022; Dewi & Anisykurlillah, 2021; Nurliasari & Achmad, 2020; dan Yakubu *et al.*, 2020). Rapat komite audit yang lebih sering mungkin menghasilkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi karena komite audit dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) merupakan keikutsertaan individu yang aktif dalam proses pembuatan keputusan di perusahaan, umumnya direksi dan komisaris, menjadi bagian dari pemilik saham perusahaan. Dalam teori agensi, konflik keagenan berasal dari kecenderungan manajer untuk mengambil keuntungan tambahan dari sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjadi insentif untuk mendorong manajer mencurahkan upaya terbaiknya bagi perusahaan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong kinerja manajer dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham karena mereka juga menjadi pemilik saham perusahaan. Dengan kata lain, kondisi ini membantu mengurangi motivasi manajer untuk meningkatkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham

(Rostami & Rezaei, 2022). Manajer akan terdorong untuk berkeinginan memiliki informasi terpercaya karena akan mempengaruhi hasil investasinya (sebagai pemegang saham), sehingga manajer akan berusaha mencegah terjadinya perilaku curang dengan menyajikan keterbukaan informasi yang tepat dalam laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan (Shan *et al.*, 2024; Yendrawati *et al.*, 2023; Probohudono *et al.* 2022; Nurcahyono *et al.* 2021; dan Kusuma & Fitriani, 2020; Utomo *et al.*, 2019). Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen menjalankan perannya sejalan dengan kepentingan pemegang saham karena kepemilikan saham akan menjaga kepentingan Bersama sebagai pemegang saham dan menghindari tindakan tidak etis yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan, sehingga risiko konflik kepentingan dapat diminimalisir.

Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan bisnis oleh pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa dan memiliki tujuan tertentu, sehingga risiko salah saji material menjadi lebih tinggi daripada transaksi dengan pihak tidak berelasi (*unrelated party transaction*) (Yendrawati & Hernanda, 2022). PSAK No. 7 menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Oleh sebab itu, risiko penyalahgunaan kesepakatan (antar pihak berelasi) untuk menyajikan laporan keuangan secara tidak transparan dan akuntabel akan semakin besar.

Teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1978) menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela untuk mengurangi biaya politik karena otoritas pengatur mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diungkapkan. Faktor biaya politik dalam teori akuntansi positif menduga bahwa perusahaan besar, misalnya perusahaan pertambangan, dibandingkan perusahaan kecil memilih metode akuntansi yang akan menggeser laba dari periode saat ini ke periode mendatang. Kondisi ini memunculkan risiko pengalihan atau pemindahan kekayaan (*tunneling*) dari pemegang saham yang disamarkan melalui transaksi pihak berelasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi (Habib *et al.*, 2017). Lebih lanjut, perusahaan menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memanipulasi laporan keuangan (Kabwe, 2023). Kecenderungan transaksi pihak berelasi yang dilakukan sebagai salah satu metode untuk memanipulasi laporan keuangan pada gilirannya akan meningkatkan risiko konflik kepentingan sebagaimana diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kabwe, 2023; Ismail Khan & Muhammad Hapiz, 2022; Daresta & Suryani, 2022; Tarighi *et al.*, 2022; Pakdelan *et al.*, 2022; Zimon *et al.*, 2021). Selain itu, semakin kompleks transaksi pihak berelasi, maka semakin parah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (agen) karena risiko lebih besar terjadi apabila transaksi dan kesepakatan terkait dilakukan secara tidak transparan dengan pihak berelasi untuk kepentingan pribadi mereka dan pada gilirannya akan menggeser kepentingan pemilik (prinsipal).

Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Kepemilikan pemerintah (*government ownership*) merupakan kondisi di mana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu perusahaan. Hubungan politik pemilik dapat diproksikan dengan sifat kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018). Ketika hubungan politik dibangun melalui kepemilikan parsial oleh badan pemerintah, penegakan hukum yang lebih lunak akan diimbangi dengan adanya konflik insentif dari pemerintah sebagai pemungut pajak (Preuss & Königgruber, 2021). Hubungan politik yang terbentuk antara kepentingan pemerintah dan sektor korporasi ini memungkinkan intervensi pemerintah untuk melakukan kontrol atau kendali atas suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap manajemen, termasuk bagaimana sumber daya perusahaan dikelola dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Teori akuntabilitas (Tetlock, 1985) menggambarkan individu sebagai politisi yang bereaksi terhadap akuntabilitas dengan cara yang mengoptimalkan posisi mereka dalam sistem sosial, khususnya bagi eksekutif. Peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang membuat pejabat administratif bertanggung jawab kepada warga negara (Hussain & Moriarty, 2018) memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Liang *et al.*, 2023; Ababneh & Aga, 2019; dan Wu *et al.*, 2016). Pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keadilan dan transparansi akan turut mendorong perusahaan, di mana terdapat kepemilikan pemerintah, untuk memastikan pengawasan manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi termasuk insentif positif atas perilaku etis manajemen (Ruhnka & Boerstler, 1998), akses informasi dan sumber daya berkelanjutan (Boso *et al.*, 2017), serta memastikan kepercayaan dan reputasi publik yang baik karena perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung menjadi perhatian media kritis (Preuss & Königsgruber, 2021), masyarakat umum, dan organisasi atau forum sosial, hingga mendorong penyajian laporan keuangan yang berkualitas (Ababneh & Aga, 2019).

Pengaruh koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

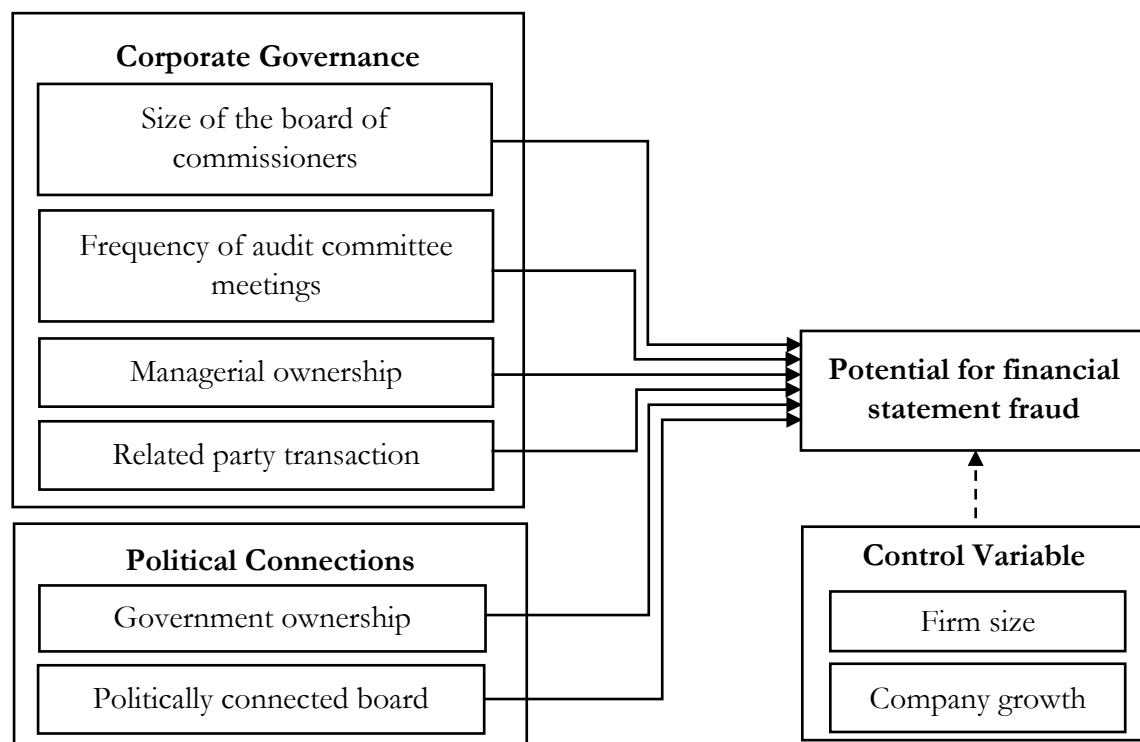
Faccio *et al.* (2006) mendefinisikan sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika setidaknya salah satu pejabat tinggi perusahaan (eksekutif perusahaan, dewan komisaris atau direksi, atau pemegang saham mayoritas (mengendalikan setidaknya 10% dari saham dengan hak suara perusahaan) adalah kepala negara (yaitu, presiden, raja, atau perdana menteri), menteri pemerintah, anggota parlemen nasional, partai politik atau terafiliasi politik. Dewan komisaris dan direksi yang memiliki koneksi politik (*politically connected board*) dapat memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah (Brugués *et al.*, 2024), dan kecurangan laporan keuangan (Sudirman *et al.*, 2023).

Teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1978) mengemukakan faktor biaya politik (*political costs*) dapat menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik. Sektor politik memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi transfer kekayaan antar berbagai kelompok, dan sektor korporasi sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan ini. Sehingga eksekutif perusahaan yang berada pada jabatan politik atau memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik, sehingga pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan politik untuk keuntungan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki koneksi politik berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Wang *et al.*, 2024; Maulidi *et al.*, 2023; Sudirman *et al.*, 2023; dan Rezazadeh & Mohammadi, 2019). Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengingat sifat oportunistik mereka untuk kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah dan melakukan tindakan kecurangan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah usulan model konseptual penelitian dengan atribut tata kelola perusahaan menggunakan ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak berelasi, dan koneksi politik menggunakan kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Gambar 1 menyajikan model konseptual penelitian tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan.



Gambar 1. Model Konseptual Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

Sumber: Olahan Penulis

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif untuk membangun model konseptual terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Menurut Varpio *et al.* (2020), kerangka konseptual adalah pembenaran mengapa suatu penelitian tertentu harus dilakukan. Kerangka konseptual (1) menggambarkan keadaan pengetahuan yang diketahui, biasanya melalui tinjauan pustaka; (2) mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang suatu fenomena atau masalah; dan (3) menguraikan dasar-dasar metodologis dari proyek penelitian. Kerangka konseptual disusun untuk menjawab dua pertanyaan: "Mengapa penelitian ini penting?" dan "Kontribusi apa yang mungkin diberikan temuan ini terhadap apa yang sudah diketahui?". Penelitian konseptual tidak melibatkan percobaan praktis. Dalam penelitian deduktif objektif, kerangka konseptual biasanya mencakup deskripsi literatur yang relevan, ringkasan teori yang relevan, penjelasan mengapa teori ini dapat menjadi informasi dalam konteks ini, pertanyaan penelitian spesifik yang mungkin berisi hipotesis, dasar pemikiran metodologi penelitian yang diadopsi, dan serangkaian hasil atau variabel yang menarik. Kerangka konseptual diselesaikan sebelum penelitian dan jarang dimodifikasi setelah pengumpulan data dimulai. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan kajian teoritis pada model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Selain itu, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam mengidentifikasi pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Kecurangan laporan keuangan merupakan masalah global yang berdampak negatif terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan terkait, khususnya pemegang saham. Oleh sebab itu, laporan keuangan berperan penting untuk mengungkapkan aktivitas ekonomi perusahaan, sehingga laporan keuangan harus disusun secara transparan dan akuntabel. Pendekatan yang sering digunakan untuk

menganalisis potensi kecurangan laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan. Selain itu, area politik dan bisnis yang masih menjadi *gray area* telah menjadi perhatian penulis untuk menganalisis dampaknya terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa atribut tata kelola perusahaan dan koneksi politik perusahaan harus dipertimbangkan dalam upaya perusahaan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan. Beberapa atribut tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan seperti ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak terkait. Kemudian, perspektif koneksi politik perusahaan dapat dilihat melalui kepemilikan pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi. Penulis mengajukan sebuah model konseptual dalam menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Teori yang digunakan dalam model konseptual ini adalah teori agensi, teori akuntabilitas, dan teori akuntansi positif. Model penelitian dapat dilakukan melalui penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Model konseptual ini bermanfaat untuk memberikan interpretasi baru terhadap potensi kecurangan laporan keuangan khususnya dari tata kelola perusahaan dan koneksi politik berdasarkan teori ekonomi klasik (teori agensi, teori akuntabilitas, dan teori akuntansi positif) dan perspektif penulis.

REFERENSI

- Ababneh, T. A. M., & Aga, M. (2019). The impact of sustainable financial data governance, political connections, and creative accounting practices on organizational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, 11(20). <https://doi.org/10.3390/su11205676>
- Bertrand, M., Kramarz, F., Schoar, A., & Thesmar, D. (2018). The Cost of Political Connections. *Review of Finance*, 22(3), 849–876. <https://doi.org/10.1093/rof/rfy008>
- Boland, M., & Godsell, D. (2020). Local Soldier Fatalities and War Profiteers: New Tests of The Political Cost Hypothesis. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101316. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101316>
- Boso, N., Danso, A., Leonidou, C., Uddin, M., Adeola, O., & Hultman, M. (2017). Does Financial Resource Slack Drive Sustainability Expenditure in Developing Economy Small and Medium-Sized Enterprises? *Journal of Business Research*, 80(June), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.016>
- Brogi, M., Gallucci, C., & Santulli, R. (2021). Does One Size Fit All? A Configurational Approach to Board Effectiveness in Limiting the Excess Cash. *Management Decision*, 59(13), 136–163. <https://doi.org/10.1108/MD-08-2020-0999>
- Brugués, F., Brugués, J., & Giambra, S. (2024). Political Connections and Misallocation of Procurement Contracts: Evidence From Ecuador. *Journal of Development Economics*, 170, 1–34. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103296>
- Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep Learning for Detecting Financial Statement Fraud. *Decision Support Systems*, 139(October), 113421. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113421>
- Dahlan, M., & Andesto, R. (2022). The Characteristic Influence of the Board of Commissioners, on Financial Reporting Fraud and its Implications on the Value of the Company. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 495–504. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.37>
- Dandapani, K., & Shahrokhi, M. (2022). Guest Editorial: Historical Perspectives On Corporate Governance Debate and Introduction to the Special Issue on Corporate Governance and Sustainability. *Managerial Finance*, 48(8), 1117–1122. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2022-0237>
- Daresta, T., & Suryani Elly. (2022). Pengaruh Faktor-Faktor Kolusi Terhadap Kecurangan Laporan

- Keuangan. *Journal of Management & Business*, 5(2), 342–351. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.2893>
- Dewi, K., & Anisykurlillah, I. (2021). Analysis of the Effect of Fraud Pentagon Factors on Fraudulent Financial Statement with Audit Committee as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 39–46. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i1.44520>
- Diah, E., Arum, P., Wijaya, R., Wahyudi, I., & Brilliant, A. B. (2023). Corporate Governance and Financial Statement Fraud during the COVID-19: Study of Companies under Special Monitoring in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political Connections and Corporate Bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Firdarini, K. C. (2023). Opini Audit sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh profitabilitas dan likuiditas pada perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 78–89. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.16>
- Guidice, R. M., Mero, N. P., & Greene, J. V. (2013). Perceptions of accountability In Family Business: Using Accountability Theory to Understand Differences Between Family And Nonfamily Executives. *Journal of Family Business Strategy*, 4(4), 233–244. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2013.09.001>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hussain, W., & Moriarty, J. (2018). Accountable to Whom ? Rethinking the Role of Corporations in Political CSR. *Journal of Business Ethics*, 149(3), 519–534.
- Ismail Khan, N., & Muhammad Hapiz, A. A. (2022). Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysian Public Listed Companies. *Jurnal Intelek*, 17(1), 181. <https://doi.org/10.24191/ji.v17i1.15937>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaab Omeir, A., Vasiliauskaite, D., & Soleimanizadeh, E. (2023). Detection of Financial Statements Fraud Using Beneish and Dechow Models. *Journal of Governance and Regulation*, 12(3 Special Issue), 334–344. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3siart15>
- Kabwe, M. (2023). Fraudulent Financial Reporting and Related Party Transactions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(2), 217–228. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2365>
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board Structure and the Likelihood of Financial Statement Fraud. Does Audit Fee Matter? Evidence From Manufacturing Firms in the East Africa Community. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>
- Kholid, A. W. N., Utami, E. R., & Kresnawati, E. (2023). Political Connections and Executive Remuneration in Indonesia: Does the Role of Institutional Ownership Matters? *Accounting Analysis Journal*, 11(2), 75–84. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i2.59862>
- Kurnia, Z., Arum, E. D. P., & Wijaya Z., R. (2024). the Influence of Corporate Governance on Financial Report Fraud With Company Size As a Moderating Variable in Infrastructure, Utilities, and Transportation Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange During the Period 2019-2021. *Cashflow Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 3(2), 276–290. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v3i2.962>

- Kusuma, H., & Fitriani, N. (2020). Ownership Structure and the Likelihood of Financial Reporting fraud. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 121–140.
- Lemaître, S. (2019). Illicit Financial Flows within the Extractive Industries Sector: A Glance at How Legal Requirements can be Manipulated and Diverted. *Crime, Law and Social Change*, 71(1), 107–128. <https://doi.org/10.1007/s10611-018-9791-x>
- Liang, Q., Wang, Z., Guan, X., & Qin, W. (2023). Party Direct Control and Corporate Fraud: Evidence from China. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 92, 274–290. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.10.008>
- Maulidi, A., Shonhadji, N., Fachruzzaman, Sari, R. P., Nuswantara, D. A., & Widuri, R. (2023). Are Female CFOs More Ethical to the Occurrences of Financial Reporting Fraud? Theoretical and Empirical Evidence from Cross-listed Firms in the US. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1342–1366. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0170>
- Nasir, N. A. B. M., Ali, M. J., & Ahmed, K. (2019). Corporate Governance, Board Ethnicity and Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysia. *Accounting Research Journal*, 32(3), 514–531. <https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2018-0024>
- Negoro, D. A., & Wakan, M. (2022). Effect of Capital Structure , Liquidity , and Profitability on Financial Distress with the Effectiveness of the Audit Committee as Variable Moderate. *American International Journal of Business Management*, 5(06), 63–82.
- Nurchayono, N., Hanum, A. N., Kristiana, I., & Pamungkas, I. D. (2021). Predicting Fraudulent Financial Statement Risk: The Testing Dechow F-Score Financial Sector Company in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1487–1494. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090625>
- Nurliasari, K. E., & Achmad, T. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(2020), 1–12.
- Pakdelan, S., Azar Brahman, A., & Heydari Filabadi, G. (2022). Investigating the Relationship between Transactions with Affiliates and Fraudulent Reporting by Explaining the Moderating Role of Corporate Governance Companies Listed in Tehran Stock Exchange. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(4), 125–144. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.4.16>
- Preuss, S., & Königsgruber, R. (2021). How Do Corporate Political Connections Influence Financial Reporting? A Synthesis of the Literature. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106802. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802>
- Probohudono, A. N., Lubis, A. T., Nahartyo, E., & Arifah, S. (2022). Governance Structure and the Tendency to Do Financial Statements Fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art6>
- Purwiyanti, D., & Laksito, H. (2022). The Effect of Audit Committee Effectiveness and Potential Fraudulent Financial Statements. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 7(1), 86–97. <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i1.273>
- Rezazadeh, J., & Mohammadi, A. (2019). Managerial Ability, Political Connections, and Fraudulent Financial Reporting in China. *Journal of Accounting and Auditing Review*, 26(2), 141–162. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004>
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate Governance and Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- Rudyanto, A. (2024). Ownership Dynamics and Financial Statement Fraud : A Study in the Context of COVID-19. *Global Research Review in Business and Economics*, 10(04), 109–115.
- Ruhnka, J. C., & Boerstler, H. (1998). Governmental Incentives for Corporate Self-regulation. *Journal of Business Ethics*, 17(3), 309–326. <https://doi.org/10.1023/A:1005757628513>

- Setianingsih, R., Iswanaji, C., & Retnosari, R. (2024). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Wanita, Dan Aktivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Farmasi Tahun 2018-2022. *Akuntansiku*, 3(2), 113–121. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i2.493>
- Shan, Y. G., Troshani, I., Wang, J., & Zhang, L. (2024). Managerial Ownership and Financial Distress: Evidence from the Chinese Stock Market. *International Journal of Managerial Finance*, 20(1), 192–221. <https://doi.org/10.1108/IJMF-06-2022-0270>
- Sudirman, I., Hasan, H., Kartini, Syamsuddin, & Nirwana. (2023). The Fraud Gone Model and Political Connection – Distribution Approach. *Journal of Distribution Science*, 21(12), 71–81. <https://doi.org/10.15722/jds.21.12.202312.71>
- Tarighi, H., Hosseiny, Z. N., Abbaszadeh, M. R., & Zimon, G. (2022). How Do Financial Distress Risk and Related Party Transactions. *Risks*, 10(46), 1–23.
- Tarjo, T., Prasetyono, P., Sakti, E., Pujiono, Mat-Isa, Y., & Safkaur, O. (2023). Predicting Fraudulent Financial Statement Using Cash Flow Shenanigans. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 33–46. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.15283>
- Tetlock. (1985). Accountability: The Neglected Social Context of Judgment and Choice. *Research in Organizational Behavior*, 7, 297.
- Utomo, S. D., Machmuddah, Z., & Pamungkas, I. D. (2019). The Effect of Auditor Switching and Managerial Ownership on Fraudulent Financial Statement. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 16, 306–315.
- Varpio, L., Paradis, E., Uijtdehaage, S., & Young, M. (2020). The Distinctions Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework. *Academic Medicine*, 95(7), 989–994. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003075>
- Wang, Y., Ashton, J. K., & Liu, J. (2024). Does the Form of State Ownership and Political Connections Influence the Incidence of Financial Statement Fraud? *European Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2024.2363421>
- Watts, R. L., Zimmerman, J. L., & Ross Watts, S. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting. *The Accounting Review*, 53(I), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729%0Ahttp://about.jstor.org/terms>
- Wu, W., Johan, S. A., & Rui, O. M. (2016). Institutional Investors, Political Connections, and the Incidence of Regulatory Enforcement Against Corporate Fraud. *Journal of Business Ethics*, 134(4), 709–726. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2392-4>
- Yakubu, U., Abdullahi, M., & Ibrahim, A. M. (2020). Audit Committee Effectiveness on Firm 's Financial Distress of Listed Industrial Goods Firms in Nigeria. *Journal of Science Technology And Education*, 8(3), 10–21.
- Yendrawati, R., & Hernanda, S. A. (2022). Fraud Hexagon : Pendeteksian Potensi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score Model. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(5), 73.
- Yendrawati, R., Riantika, R. L., Kusumadewi, F. Z., Azmi, N. A., & Mohd-Sanusi, Z. (2023). Effects of Corporate Governance and Financial Performance on Fraudulent Financial Statements: Evidence from Indonesia's Property, Real Estate, and Building Construction Sectors. *Management and Accounting Review*, 22(1), 1–25. <https://doi.org/10.24191/mar.v22i01-01>
- Zhang, J. (2018). Public Governance and Corporate Fraud: Evidence from the Recent Anti-corruption Campaign in China. *Journal of Business Ethics*, 148(2), 375–396. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3025-x>

Zimon, G., Appolloni, A., Tarighi, H., Shahmohammadi, S., & Daneshpou, E. (2021). Earnings Management, Related Party Transactions and Corporate Performance: The Moderating Role of Internal Control. *Risks*, 9(8), 1–26. <https://doi.org/10.3390/risks9080146>